



||||| Daniel Mohammad Rosyid |||||

# SURABAYA MENGGUGAT



ROSYID  
COLLEGE  
OF ARTS &  
MARITIME  
STUDIES.

# SURABAYA MENGGUGAT!

**Daniel Mohammad Rosyid**

*(Santri Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi)*

20 Mei 2018

**Padepokan Seni dan Bahari Gunung Anyar  
Surabaya**

Setahu saya ada dua orang radikal yang menjadi guru bagi banyak orang: Yesus dan Muhammad. Keduanya dengan jernih menyuarakan kebenaran pada saat *hoaxes* di mana-mana: kebenaran dicampuradukkan dengan kebatilan dan kebenaran disembunyikan dari kesadaran publik. Suara kebenaran yang jernih itu meneror elite yang kehidupannya bersandar pada *hoaxes*.



# Pengantar Kata

## Rumah Peneleh

Malam itu, sekitar 100 tahun lalu, menjelang subuh, Pak Tjokro melihat Karno, Karto dan Muso masih tertidur pulas. Seperti pagi-pagi lainnya sebelum ini, dia bisa saja menggorok leher ketiga anak muda yang kos di rumahnya di Peneleh, Surabaya itu, lalu menikmati kehidupan mapan priyayi Jawa di Hindia Belanda.

Tapi Pak Tjokro mengambil resiko membiarkan ketiganya hidup untuk kemudian bermimpi tentang sebuah negeri baru yang berbeda dengan yang memanjakannya ini. Keputusannya -sebagai mentor para pendiri Republik ini- diiringi rasa cemas yang tak terelakkan. Negeri baru di tanah yang begitu bhinneka akan senantiasa didera ketegangan untuk tetap tunggal ika.

Jika Karno hanya kuliah di ITB saja, pastilah dia bakal jadi arsitek hebat. Perjumpaannya dengan Pak Tjokro di Peneleh itulah yang membuatnya kelak menjadi proklamator.

Kini Rumah Peneleh itu makin tua dan tidak terawat. Makin pengap dan sumpek. Jangankan ber-demonstrasi, berpikir bebas saja menghadapi intimidasi.

Semuanya yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah selesai; harganya sudah mati.

Saya menolak membiarkan rumah itu roboh.  
Apapun yang terjadi.

**Daniel Mohammad Rosyid**





---

## Pendahuluan

# Pasca 1998: Surplus Fanatisme, Difisit Akal

**Rocky Gerung**

*(Aktivis Forum Demokrasi pada 1990-an)*

Tugas pemerintah adalah memberi rasa aman warga, bukan mengeksploitasi ketakutan dengan cara yang juga menakutkan.

"The middle ground is a notoriously exposed, dangerous, and ungrateful position". — Isaiah Berlin

Negeri ini didirikan dengan pikiran bermutu: bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Supaya penjajahan tak berulang, maka bangsa ini harus cerdas. Karena itu, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas utama pemerintah. Demokrasi adalah fasilitas untuk menyelenggarakan kemerdekaan berpikir, yaitu kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan kecerdasan. Tetapi justru kondisi itu yang tak tersedia selama dua era sejarah politik kita.

Orde Lama dan Orde Baru; dua-duanya memusuhi pikiran. Sukarno tak menyukai “kaum intelektual”. Ia mencerca mereka sebagai “*textbook thinking*” kebarat-baratan. Soeharto membungkam kebebasan berpendapat, dan menjadikan “kaum intelektual” sekadar “teknokrat” untuk menjalankan pembangunan. Akumulasi kekuasaan adalah akibat dari takluknya pikiran kritis.

Keangkuhan Negara Reformasi adalah pulihnya kritisisme. Kekacauan ekonomi bertemu dengan retaknya resim Soeharto. Teknokrat mundur karena melihat perintah politik Cendana makin mengacaukan rasionalitas kebijakan kabinet. Nepotisme menjadi beban ekonomi. Tentara memutuskan mengambil jarak dari kekuasaan, memungkinkan mahasiswa menempati ruang oposisi yang lebih frontal. Tumbuh kesadaran baru tentang pentingnya hak asasi manusia, reformasi TNI, dan pemberantasan korupsi.

Semua itu adalah modal etik yang kuat untuk memulai “Indonesia Baru”. Itu dua puluh tahun lalu.

Sekarang? Setiap Kamis sore, deretan payung hitam berbaris diam di depan Istana Presiden. Tidak untuk antre sembako, apalagi berharap jabatan komisaris BUMN, melainkan cuma menuntut pemenuhan hak asasi manusia dari negara yang seharusnya beradab.

Tapi rutinitas Aksi Kamisan itu kalah pamor dengan aktivitas hilir-mudik presiden untuk gunting pita dan bagi-bagi sembako. Ada jarak antara Istana dan Pegunungan Kendeng; ada pagar antara presiden dan para keluarga korban penghilangan paksa; ada ketidakadilan yang tidak ingin dipahami negara. Ada apa dengan negara?

Penjelasan pemerintah pasti panjang, dan berbelit. Yang pendek adalah pikiran politiknya: “Singkirkan HAM, Stabilitas yang Penting”. Itulah watak dasar penguasa. Rangkaian teror memang menakutkan, tetapi penyingkiran HAM jelas-jelas adalah proposal Orwellian yang berbahaya.

Reformasi tidak dimaksudkan untuk menyelundupkan mental otoriter Orde Baru. Reformasi tidak disediakan untuk mengawasi gerak-gerik seluruh warga. Tugas pemerintah adalah memberi rasa aman warga, bukan mengeksploitasi ketakutan dengan cara yang juga menakutkan.

Tetapi ajaib. Justru demagogi semacam itulah yang kuat didukung oleh kaum “intelektual pro status quo”. Sekadar demi melanjutkan dendam politik, akal



sehat dikesampingkan dan insiniasi dikedepankan: “Kami Pancasila!” Tentu, tapi artinya? Apa ukurannya? Siapa yang bukan-Pancasila?

Gugup dan gagap, kaum “liberal” juga memelihara arogansi yang sama: “Pancasila sudah final!”. Dan dengan arogansi itu Pancasila diedarkan dari satu seminar ke seminar yang lain untuk didiskusikan. Mendiskusikan sesuatu yang sudah final? Ajaib! Inilah kaum “liberal paranoid” yang mendadak konyol karena berangsur jadi pemuja kuasa, dan mulai menghitung giliran berkuasa. Mereka gagal melihat hutan karena sibuk menghitung pohon.

Bagaimana demokrasi hendak dimajukan bila pikiran kaum intelektual menjadi konservatif? Bagaimana hak asasi manusia hendak diselenggarakan bila tabiat kaum liberal menjadi oportunist?

Ada pikiran yang berhenti di era ini. Konfrontasi politik sejak Pemilu 2014, yang berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bukan saja telah membelah masyarakat politik, tetapi juga mendangkalkan kaum terpelajar: bergerombol di forum-forum media sosial, menumpuk sentimen, lalu terengah-engah memusuhi oposisi.

Hanya demi ketakutan kehilangan afiliasi dengan kekuasaan, para aktivis masyarakat sipil meninggalkan fungsi kritik sosialnya, lalu berbaris mencari suaka di



Istana. Tak masuk akal, aktivis masyarakat sipil bergerombol di sekitar kekuasaan yang anti-HAM.

Mental feodal telah mengubah akademisi menjadi pelayan birokrasi, menanggalkan ide dan pikiran. Inilah era ketika elektabilitas mengepung intelektualitas, era ketika para pengajar menjadi pemuja *status quo*. Kekurangan pikiran—itulah sinopsis reformasi hari ini.

"The middle ground"—Isaiah Berlin (1909-97) memilih istilah itu setelah ia mempelajari sejarah pikiran Eropa yang membawa banyak penderitaan manusia pada abad lalu. Bahwa ketakcukupan perspektif telah menjerumuskan orang ke dalam fanatisme politik, kepicikan dan pemujaan. Suatu "*pathological suspicion*", dalam istilah Berlin, juga ada pada kita hari-hari ini.

Kita hidup dalam situasi saling intai, dan bereaksi sebelum duduk perkara dipahami utuh. Perbedaan justru dieksploitasi dengan memojokkan suatu golongan sebagai kaum fundamental, dan yang lain sebagai penjaga NKRI. Negara justru menguatkan stigma ini melalui *public relation* yang insinuatif: "Tidak ada tempat bagi kaum intoleran". Negara telah membuat definisi yang justru patologis, membangkitkan luka-luka ideologis di masa lalu. Keakraban berwarganegara dihilangkan oleh keangkuhan negara.

Kaum intelektual, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil yang berhenti mempersoalkan kekuasaan adalah

para medioker yang patuh karena tak paham, dan takluk karena tak cukup berakal. Kritik tak mampu diucapkan oleh seorang medioker. Politik yang absolutis juga dapat berlangsung dalam era transisi demokrasi ketika kaum medioker berbondong-bondong menuju Istana, bukan untuk memberi kritik, tetapi untuk mematuhi diri kepada kekuasaan.

Sekadar dipakai untuk “public relation”, tokoh-tokoh masyarakat sipil dari sektor agama dan kebudayaan juga memperkuat barisan “the middle ground” ini. Pluralisme adalah umpan politik yang dengan mudah dilahap barisan ini, karena kekuasaan memiliki seluruh perangkat untuk memaksimalkan kecemasan “kaum minoritas”. Setiap kali terjadi konflik sosial, pemerintah datang dengan solusi moral: kumpulkan pemuka agama.

Toleransi menjadi proyek ideologis negara, kendati dalam pengertian yang sangat sempit, yaitu sekadar toleransi di antara umat beragama. Bahwa sumber ketegangan sosial itu adalah disparitas dan kesalahan kebijakan pemerintah, tak ingin diakui.

Esensi KritikKritik adalah evaluasi pikiran terhadap realitas, yaitu mengurai inkonsistensi kebijakan. Inkonsistensi dalam kebijakan pertama-tama harus dimulai dengan memeriksa inkohereni dalam ide. Karena itu fungsi kritik adalah mengurai, bukan membangun. Itulah tugas utama akademisi.

Jadi, tuntutan agar kritik itu harus “yang membangun” adalah tuntutan dari mereka yang tak ingin dikritik. Hakikat kritik adalah menunjukkan kesalahan, bukan memperbaikinya. Adalah tugas yang dikritik untuk memperbaiki konsepnya.

Dalam urusan publik, tugas si pejabat publik untuk memperbaiki kebijakan, karena ia digaji rakyat untuk itu. Demokrasi hidup dengan kritik. Tugas oposisi sudah dimulai sejak presiden dilantik. Karena itu, ide mengganti presiden memang melekat pada tugas oposisi. Itu bukan saja konstitusional, tapi memang logis: sungguh dungu bila oposisi berniat tidak mengganti presiden. Karena itu, mengaktifkan oposisi, justru menjamin kekuasaan tidak menempuh tradisi primitifnya: pongah.

Lalu, apakah kita pesimistis dengan keadaan? Tak perlu dijawab, karena politik bukan klinik psikologi. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologi dari kaum terdidik yang justru menjadi pemuja kekuasaan.

Dalam isu mutakhir hari ini, yaitu tentang usulan agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan soal terorisme, pendukung utama usulan ini adalah justru kalangan terdidik dan aktivis masyarakat sipil pro pemerintah. Sungguh absurd bahwa kebijakan yang akan melemahkan demokrasi, justru dibela oleh kalangan yang mengerti hakikat demokrasi: bahwa tak sekali-kali mengizinkan penguasa



memutuskan atas kehendak sendiri, aturan yang potensial membatalkan demokrasi.

Di depan kekuasaan, para tokoh masyarakat sipil patuh karena fanatisme. Kalangan terpelajar patuh karena kekurangan pikiran. Dan merekalah yang kini menyelenggarakan *public relations* pemerintah. Ajaib, tapi itulah sinopsis politik kita setelah 20 tahun reformasi: surplus fanatisme, defisit akal. [21 Mei 2018].

=====



## ❖ Meme Pembubaran HTI

Awal Mei 2018 ini meme yang memuat foto dan komentar saya soal pembubaran HTI telah viral di media sosial. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin 7/5 malam saya telah dipanggil oleh pimpinan ITS untuk menjelaskan posisi saya soal meme tersebut. Meme poster tersebut memuat komentar pendek saya soal kasus pembubaran HTI seminggu sebelumnya. Dalam meme tersebut saya disebut sebagai Guru Besar ITS dengan berbagai tagar yang mudah mempersepsi saya sebagai pendukung HTI atau bahkan anggota HTI, lalu ITS adalah sarang HTI. Luar biasa.

Selama setahun terakhir ini saya memang banyak berinteraksi dengan penggiat HTI dalam beberapa diskusi. Di rumah saya punya beberapa "buku wajib" HTI. Terakhir bahkan saya undang kawan-kawan saya untuk membedah sebuah disertasi tahun 2000-an di London School of Economics dengan judul "The Inevitable Caliphate". Seorang kawan dari JPIP ikut membedah disertasi tersebut secara kritis. Teman-teman HTI berusaha keras meyakinkan saya dan istri saya tentang peran penting khilafah. Saya dan istri saya sudah sejak lama percaya khilafah, namun dengan pemahaman yang berbeda dari versi HTI. Bagi saya, khilafah baru yang disebut Imam Mahdi hanya bisa hadir di atas reruntuhan Kerajaan Arab Saudi. Sebagian pemahaman saya ini telah saya tulis dalam

sebuah artikel di Jawa Pos serta dalam beberapa portal berita seperti Cakrawarta.

Bagi saya saat ini, ummat manusia berada dalam khilafah *Pac Americana* dengan Obama, lalu Trump sebagai khalifah. Khilafah adalah satu bentuk Tata Dunia (*World Order*) dengan berbagai instrumen teknokratiknya seperti PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya seperti the World Bank dan International Monetary Fund. Bagi saya, dunia saat ini dibawah khilafah yang dzalim yang sewenang-wenang atas kebanyakan ummat manusia. Pancasila tidak mungkin hidup subur dalam ekosistem Tata Dunia semacam ini. Inilah yang menjelaskan mengapa Pancasila telah dipaksakan secara semu saat Orde Baru, dan hampir saja dibuang saat Reformasi. Seperti peringatan Bung Karno, saat ini praktis kita sudah mengalami penjajahan baru. Penjajahan *remotely controlled* melalui sistem ekonomi dan keuangan global ribawi. Oleh Bung Karno ini disebut nekolim.

Saya menolak Perpu Ormas karena saya nilai sebagai titik masuk bagi otoriterianisme yang akan dipakai untuk mengontrol pikiran orang. Setelah sistem persekolahan banyak membuat warga muda dungu, UU Ormas ini akan memperparah kedunguan ini. Kampus bagi saya adalah *a market place of ideas*. Mahasiswa perlu berlatih memahami berbagai pikiran mendasar mengenai realitas kehidupan berbangsa dan bernegara agar pantas menjadi pemimpin bangsa di

masa depan. Menentang UU Ormas ini adalah perang melawan kedunguan.

Sebagai dosen PNS saya sudah lama tidak memposisikan diri sebagai pegawai, tapi sebagai profesional. Sebagai profesor saya juga diberi tunjangan kehormatan. Saya tidak tahu persis alasan mengapa profesor berhak atas tunjangan kehormatan ini. Saya juga pernah menjadi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Surabaya. Saat ini saya duduk menjadi anggota Majelis Kehormatan Etik PII Pusat. Setahu saya, para profesional bukan bekerja bagi siapa membayarnya. Dia melayani publik untuk kebajikan publik. Kemarin malam oleh manajemen puncak ITS saya telah diposisikan sebagai pegawai.

Saya lama berkeyakinan bahwa universitas adalah lembaga yang istimewa karena berhak memberi gelar sarjana bahkan doktor. Lembaga lain tidak punya hak semacam ini. Gelar itu disebutkan dalam *ijazah*. Ijazah ini kosa kata Arab yang memiliki akar kata yang hampir sama dengan kata *mu'jizat*. Setiap sarjana yang kami didik di ITS diharapkan dapat membuat banyak mu'jizat bagi masyarakatnya. Mu'jizat itu perkara istimewa bagi yang tidak berilmu, tetapi perkara biasa bagi sarjana.

Senin malam 7/5/2018 malam saat saya -sebagai profesional- diminta mencabut komentar saya yang viral itu saya menolak karena tidak mampu tidak konsisten dengan hati nurani saya yang telah saya



tuliskan dalam beberapa media. Saya segera ingat satu ketika (1983) sebagai Ketua Musholla ITS saya diminta menarik kembali buletin Musholla ITS oleh pimpinan ITS waktu itu. Permintaan itu juga saya tolak karena sudah terlanjur beredar bagi pengunjung pada saat Pameran Buku dan Busana Muslim di sekitar Perpustakaan ITS waktu itu. Dalam buletin itu ada foto "masjid ITS" yang terlantar pembangunannya dan foto seorang mahasiswi berjilbab serta wawancara wartawan Buletin Musholla dengan seorang mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITS.

Malam ini saya teringat almarhum ayah saya, Mr. Ibrahim Ibnu Djamhuri, seorang pengacara alumni UGM yang jadi pedagang yang telah wafat 25 tahun silam. Semula dia jaksa, lalu diasingkan untuk ngurusi sebuah pabrik minyak kelapa yang bangkrut di dekat Pelabuhan Tanjung Emas. Diasingkan karena secara terbuka dia menolak untuk memuja Soekarno di puncak kekuasaannya.

Di ruang tamu rumah kami di Semarang terpampang sebuah lukisan cat minyak Abraham Lincoln. Ayah saya itu -seorang Masyumian- adalah pengagum berat Abraham Lincoln -seorang Yahudi. Keduanya adalah sarjana hukum. Anehnya, ayah saya berpesan "kelak jadilah dokter atau tentara. Jangan kuliah di Fakultas Hukum bengkok".

## ❖ **Membangun Masyarakat Bebas**

Mencermati lintasan kehidupan demokrasi di mana pun di dunia saat ini, apa yang sedang terjadi di Indonesia juga terjadi di pusat kampiun demokrasi AS, yaitu pengorbanan kebebasan sipil (*civil liberty*) demi alasan keamanan. Teror adalah cap yang sering disematkan oleh pemerintah pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terduga teroris. Sedangkan aksi kekerasan Pemerintah yang dilakukan atas sekelompok orang yang terduga teroris tidak disebut teror tapi disebut aksi anti-teror. Makin jelas bahwa isu teror adalah isu yang politis yang sarat kepentingan kekuasaan. Teror artinya mengancam masyarakat sipil sedangkan anti-teror adalah melindungi masyarakat sipil. Padahal korbannya sama saja: masyarakat sipil juga, termasuk warga yang terduga teroris. Hanya dengan menduga saja, Pemerintah punya alasan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Korbannya adalah warga terduga teroris.

Tentu teror oleh warga itu ada walaupun harus dijelaskan tidak secara simplistik seperti karena alasan ideologi radikal. Aksi kekerasan bisa bermotif ekonomi, sosial dan politik. Mengatakan bahwa aksi teror selalu ideologis adalah menyesatkan. Demikian ulasan Prof. Din Syamsuddin baru-baru ini. Peristiwa penembakan dengan korban tewas belasan murid di Santa Fe, Texas, oleh Dimitrios Pagourtzis (17) baru-baru ini tidak disebut teror walaupun peristiwanya serupa.

Kejadian penembakan massal oleh warga sipil telah terjadi di AS untuk kesekian kalinya.

Mencermati peristiwa-peristiwa kekerasan selama 20 tahun terakhir, John Pilger -seorang jurnalis asal Australia- baru-baru ini mengatakan bahwa yang paling dikorbankan dari isu global terorisme adalah umat Islam. Bagi Pilger, tidak ada perang melawan teror. Yang ada adalah aksi kekerasan dengan menggunakan alasan terorisme. Artinya terorisme digunakan untuk membenarkan aksi kekerasan oleh Pemerintah yang berkuasa atas warganya sendiri. George Bush mengumandangkan *war on terror* untuk membenarkan aksi kekerasannya ke Iraq dan Afghanistan dengan korban tak-terhitung.

Saya cemas UU Anti Terorisme yang baru akan menjadi justifikasi tuntas bagi aksi kekerasan oleh Pemerintah atas warga negaranya sendiri. Menkopolkam Wiranto baru-baru ini bahkan mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu tahu rincian operasi anti-teror ini karena justru akan membuka kerahasiaan aksi kekerasan oleh Pemerintah ini.

Aksi teror sering dirumuskan sebagai wujud dari pemikiran radikal. Artinya terorisme selalu disebabkan oleh sebab tunggal: ideologi radikal. Teroris sering disamakan dengan radikal atau fundamentalis. Pikiran yang berbeda dengan pikiran pemerintah -pikiran arus utama- disebut pikiran radikal. Untuk itu, Pemerintah telah punya UU Ormas untuk merontokkan pikiran

yang berbeda dengan pikiran Pemerintah. Apalagi jika pikiran yang berbeda dengan pemerintah ini berkembang terorganisir dalam ormas tertentu. Pemerintah telah memperkarakan sebuah Ormas Islam yang diduga melanggar UU Ormas karena pikiran dan kegiatannya dinilai bertentangan dengan pikiran Pancasila Pemerintah.

Untuk memahami wacana ini ada baiknya kita merujuk pada statistika. Di dunia normal, selalu ada arus utama mayoritas dan arus pinggiran minoritas. Lihatlah kurva normal. Jika ekor kanan dan ekor kiri kurva normal ini dipotong, maka tidak ada kurva normal lagi. Dalam perspektif ini, sikap Pemerintah cenderung menentang prinsip-prinsip alam (*sunna-tullah*) karena pikiran-pikiran sempalan adalah bagian wajar dari normalitas. Jika dia diberangus maka justru akan terjadi situasi *abnormal*. Seperti terorisme dijadikan alasan Pemerintah untuk melakukan kekerasan atas warganya sendiri, radikalisme dijadikan alasan pemerintah untuk membungkam kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat warganya sendiri.

Baru-baru ini, Rex Tillerson ex Menlu AS era Trump, mengatakan bahwa di tengah krisis etika dan integritas para *elite*, harus dicatat bahwa unsur utama dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari warga yang bebas adalah akses pada kebenaran. Ini memerlukan pemerintah dan masyarakat yang memahami bahwa kebebasan untuk mencari kebenaran adalah intisari

dari kebebasan itu sendiri. "Kalian harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membuatmu bebas". Hanya dengan habis-habisan mempertahankan kebenaran, kita bisa menciptakan sebuah masyarakat bebas, dan demokratis yang terdiri dari warga yang majemuk sehingga warga majemuk ini dapat mencoba berbagai gagasan untuk menemukan solusi atas persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat demokratis.

Pada saat seseorang dan sekelompok orang mudah sekali dituduh anti-Pancasila oleh Pemerintah, Saya cemas, UU Ormas dan UU Anti-teror adalah tantangan paling serius atas upaya membangun masyarakat demokratis yang bebas yang justru menjadi alasan mengapa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini 73 tahun silam. Saya benar-benar cemas. Kiranya Allah Tuhan YME menolong bangsa ini.

## ❖ Matinya Tukang Kritik

Suatu ketika Bennedict Anderson berkisah tentang pengalamannya memberi kuliah umum di Universitas Chulalongkorn, Thailand. Pada audiensnya waktu itu -para dosen, guru besar dan mahasiswa pascasarjana- dia bertanya tentang seorang sutradara terkenal asal Thailand -yang film-filmnya tentang masyarakat Thailand telah memperoleh berbagai penghargaan internasional- pada para audiensnya tsb, apakah mereka mengenal

tokoh tersebut. Hanya satu orang mahasiswa pasca yang mengacungkan tangannya. Yang lain hanya bertanya-tanya *who the hell he is*. Ben Anderson kemudian mengambil kesimpulan bahwa universitas-universitas Thailand seperti banyak universitas di negara berkembang lainnya mengalami sebuah proses yang dinamainya **profesionalisasi**, lalu kehilangan banyak intelektual publik. Para profesor sibuk menekuni bidang spesialisasinya yang makin sempit dengan bahasa yang hanya bisa dipahami diantara mereka sendiri tapi tidak dipahami oleh masyarakatnya.

Menurut kamus Webster, yang disebut intelektual publik adalah seorang intelektual -yang dikenal sebagai ahli di bidang spesialisasi tertentu - yang dikenal masyarakat luas karena sering menunjukkan kesediaan untuk memberi pendapat atau komentar atas peristiwa-peristiwa menarik mutakhir apa saja yang terjadi di masyarakat. Komentar itu muncul bisa melalui sebuah wawancara dengan wartawan atau melalui tulisan opini bebas di koran atau portal berita *online*. Seorang intelektual publik biasanya menyodorkan pandangan yang berbeda dengan pandangan arus utama atau pandangan pemerintah. Pandangan intelektual publik ini sering kali juga kontroversial, tidak lazim, tapi mencerahkan karena mampu menunjukkan perspektif baru atas sebuah realita. Para intelektual publik sering juga disebut tukang kritik, *dissenter*, atau bahkan *dissident* (pemberontak politik). Pada saat ini Prof.

Noam Chomsky dari MIT adalah intelektual publik paling kesohor di AS dan sering tampil sebagai *dissident* paling tajam atas kebijakan luar negeri AS. Intelektual publik Indonesia yang makin kesohor hari ini adalah Abdus Shomad dan Rocky Gerung.

Sekitar 8 tahun silam, saat sesi presentasi sebagai calon guru besar di bidang Riset Operasi dan Optimasi Teknik Kelautan ITS, saya ditanya oleh seorang guru besar senior mengapa saya lebih banyak menulis tentang pendidikan daripada teknik kelautan. Saya jawab bahwa itu terjadi karena kecelakaan sejarah : saya diminta oleh pak Imam Utomo Gubernur Jatim waktu itu untuk mau menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur yang pertama sejak UU Sisdiknas berlaku. Sampai sekarang saya tidak tahu persis mengapa bukan ahli pendidikan yang beliau tunjuk.

Tempo hari melalui WA saya diminta pendapat oleh seorang pegiat Ormas Islam yang sedang mengajukan gugatan atas pembubarannya oleh Pemerintah. Saya jawab demikian : "Pencabutan BHP HTI oleh Pemerintah jelas mengada-ada dan sebuah upaya untuk menekan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, sambil mengaburkan ancaman yang sebenarnya sudah dan sedang terjadi atas NKRI, yaitu neokolonialisme. Jadi tindakan sewenang-wenang Pemerintah atas HTI itu adalah *intentionally crafted hoax* sambil menyembunyikan kebenaran dari kesadaran publik". Pendapat saya tsb kemudian dikemas menjadi meme

*viral* yang kemudian dibaca oleh publik bahwa saya adalah pendukung HTI.

Beberapa hari kemudian, sebuah koran nasional memberitakan bahwa pejabat tertinggi di Kementerian Ristekdikti telah memecat tiga dosen ITS yang tersangkut kasus HTI ini. Rektor ITS segera menggelar *pers release* untuk meluruskan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh ITS atas ketiga dosen tersebut. Ternyata ketiga dosen tersebut sedang diproses, mungkin menuju pemecatan mereka.

Setelah Normalisasi Kehidupan Kampus hampir 40 tahun silam, kemudian UU Ormas, UU Anti-terror, lalu release Daftar Da'i oleh Kementerian Agama baru-baru ini, saya membayangkan akan lahir regulasi Normalisasi Masjid. Saya berharap tidak banyak intelektual publik yang akan mati lagi.

## ❖ Pancasila dan Khilafah

Saya menerima Pancasila seperti rumusan almarhum Nurcholish Madjid: *kalimatun sawaa-in*, platform kehidupan bersama masyarakat yang *bhinneka tunggal ika* di dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Penerimaan saya ini sekaligus sebagai penghormatan atas kesepakatan Bung Karno, Bung Hatta dkk para pendiri bangsa Indonesia ini.



Namun harus segera diingat bahwa Pancasila dan Republik Indonesia adalah narasi, atau fiksi ala Rocky Gerung. Keduanya hanya ada dalam pikiran dan kesadaran sebagai kompleks gagasan, narasi dan cita-cita. Pancasila dan Indonesia tidak pernah dalam kondisi selesai, *in factu*, tapi selalu dalam proses menjadi *in statu nascendi*. Ini sebuah proses kreatif dinamis yang rapuh, getas, dan genting, namun penting. Menjadikan NKRI sebagai harga mati, misalnya, justru menolak *its very essence*.

Salah satu bukti RI dalam kondisi *in statu nascendi* adalah gagasan RI Serikat dan Deklarasi Djoeanda 1957 yang mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbeda dengan saat diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta. Jika Romo Mangun menilai NKRI adalah mitos, maka Saya membaca desentralisasi sebagai tahapan menuju NRIS. RIS menurut hemat saya lebih sesuai dengan kondisi geografis kepulauan dengan *mega diversity* dalam bentang alam seluas Eropa ini.

Jadi yang mengancam eksistensi Pancasila bukan Ormas Islam tertentu, atau dosen seperti saya, tapi pengalaman hidup berPancasila yang getir, pedih penuh penderitaan, ketakutan, kemiskinan, serta ketimpangan sosial dan spasial. Kita tidak bisa begitu saja mewariskan Pancasila dan Indonesia seperti segumpal emas, tapi perlu mendialogkannya dalam wacana dan praktek berkehidupan berbangsa dan bernegara yang

bebas. Iklim kebebasan itu penting agar generasi muda merasa ikut merumuskan dan menarasikan kembali Pancasila dan Indonesia dalam semua zaman. Agar keduanya tidak menjadi artefak museum yang menarik tapi tidak relevan lagi bagi setiap generasi. Ini proses yang *fragile* dan menegangkan tapi tak terelakkan.

Bagi saya, nilai-nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno dalam kesadaran bangsanya hidup subur selama kekhalifahan Islam hingga awal abad 20. Jadi kekhalifahan Islam itu memberi lahan dan udara yang subur bagi tumbuh kembang Pancasila. Justru setelah proklamasi kemerdekaan 17/8/1945 Bung Karno dkk menemukan lahan dan udara neoliberal yang tandus bagi Pancasila. Bahkan Bung Karno dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan nekolim. Orde Baru praktis memantapkan neokolonialisme di Indonesia. Reformasi sebagian lahir karena kita sebagai bangsa justru menderita dalam nekolim yang telah mengerdilkan Pancasila.

Prinsip kekhalifahan sebagai Tata Dunia atau internasionalisme sudah disadari oleh perumus Pembukaan UUD 45 dan oleh Bung Karno diadopsi dalam sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Ini merupakan inti sari dari alinea pertama Pembukaan : kehendak untuk merdeka dari penjajahan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Bagi saya kekhalifahan itu adalah Tata Dunia : *global governance* dengan semua instrumen teknokratiknya di bawah PBB seperti perjanjian-perjanjian

perdagangan, sistem keuangan, upaya memerangi perubahan iklim, pembatasan senjata nuklir, kemaritiman dsb. AS adalah salah satu negara maju yang tidak meratifikasi banyak perjanjian-perjanjian internasional itu dan dengan demikian memposisikan dirinya *above the law*. Untuk upaya menghentikan perubahan iklim dan kesepakatan Nuklir dengan Iran, misalnya, PBB telah ditelung oleh AS.

Bacaan saya atas sejarah dunia selama 100 tahun terakhir ini adalah dunia semakin tidak berperike-manusiaan dan tidak berperikeadilan sejak runtuhnya kekhalifan Turki Ottoman. Sejak itu, selama kekhalifahan *Pac Britannica* di bawah Winston Churchill kemudian *Pac Americana* di bawah Donald Trump kita menyaksikan konsistensi kita sebagai negara miskin dengan ketimpangan global yang makin parah, dunia terjerumus dalam perang *illegal* berkepanjangan, keruntuhan ekosistem dan ancaman perang nuklir di dekade kedua abad 21 ini.

Ancaman pada Pancasila dan NKRI tidak datang dari ormas-ormas Islam tertentu dan komentar dari segelintir orang seperti saya, tapi oleh sekelompok *elite* korporasi AS dan sekutu global maupun domestiknya yang sikapnya tidak saja telah mengerdilkan Pancasila, tapi langsung mengancam eksistensi spesies kita demi ekonomi perang yang didorong *military industrial complex*.

Secara matematika, bagi NKRI yang berdaulat, Pancasila itu adalah syarat perlu (*necessary condition*), sedangkan syarat cukupnya (*sufficient condition*) adalah tata dunia (khilafah) yang disusun menurut Islam.

## ❖ Surabaya Menggugat

Saat ini saya di Semarang sedang menunggu pemeriksaan Tim Adhoc Etik Senat Akademik ITS atas kasus penyebaran meme pembubaran HTI viral yang mengutip pernyataan saya soal itu. Saya belum tahu dakwaan apa yang akan ditujukan ke saya atas kasus ini: pendukung HTI yang ingin mengubah dasar negara Pancasila ? Pelanggaran UU Guru dan Dosen ? Pelanggaran disiplin PNS ?

Saya akan sampaikan pikiran-pikiran saya dalam kolom ini. Saya berharap pemeriksaan atas saya tersebut terbuka untuk umum. Saya pandang proses pemeriksaan terbuka ini penting menjadi pelajaran bagi saya pribadi, mahasiswa-mahasiswa saya, ITS, alumni-alumninya dan masyarakat umum. Jelas sidang pemeriksaan atas saya itu tidak bakal sefenomenal sidang atas Soekarno sekitar 88 tahun silam dengan judul "Indonesia Menggugat" di hadapan pengadilan *Landraad* Belanda di Bandung. Namun saya menilai bahwa pemeriksaan ini lebih bersifat politis dari pada pemeriksaan etis apalagi teknis.

Pertama, Saya memandang diri saya lebih sebagai profesional -lihat UU Guru dan Dosen 2005-, bukan sebagai pegawai, sementara dekan hanya tugas tambahan saja. Sebagai orang yang memangku jabatan dekan saya taat pada pemerintah. Rekam jejak saya selama 30 tahun bekerja serta kegiatan sehari-hari saya cukup untuk membuktikan hal tersebut. Hemat saya, pandangan dan sikap saya konsisten dan sesuai dengan UU Guru dan Dosen.

Kedua, sebagai dosen profesional saya memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar. Saya meyakini bahwa dua kebebasan inilah satu-satunya alasan paling sah mengapa dosen memiliki posisi berbeda dengan tenaga kependidikan, dan universitas - baik negeri atau swasta- berbeda dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga pemerintah sekalipun. Karena alasan yang unik itulah universitas berhak menganugerahi gelar sarjana, magister dan doktor. Gelar itu adalah bukti bahwa para sarjana, magister dan doktor telah dilatih untuk mencari, menemukan, dan mempertahankan kebenaran. Tanpa jaminan kebebasan, semua proses pencarian kebenaran itu akan menghadapi hambatan yang sangat serius.

Ketiga, Saya bersikap bahwa kesetiaan Saya tidak pada Pemerintah yang sedang berkuasa, tapi pada negara dan konstitusi. Perkembangan wacana publik cenderung mengaburkan perbedaan esensial antara Negara dan Pemerintah. Pemerintah partisan boleh

berganti sesuai siklus Pemilu, tapi negara dan konstitusi tidak. Selama 10 tahun terakhir, saya melihat sebuah proses birokratisasi PTN yang menjadikan dosen lebih sebagai pegawai daripada profesional. Sikap saya itu seperti sikap anggota TNI dan PNS Jerman : hanya taat dan setia pada negara dan konstitusi, bukan pada Pemerintah. Sikap pemerintah untuk merancukan Negara dan Pemerintah ini saya duga berasal dari kenyataan sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda. Sebagai pemerintahan kolonial, Belanda merekrut pegawai untuk menjalankan pemerintahan.

Keempat, birokratisasi kampus itu secara perlahan tapi pasti akan menempatkan universitas pada *maqom* yang lebih rendah dan akan kehilangan *privelege* untuk memberi gelar akademik. Mungkin keistimewaan itu akan tetap ada, tapi gelar itu makin tidak bernilai. Oleh karena itu merampas iklim kebebasan universitas dengan menempatkan dosen PTN lebih sebagai PNS daripada sebagai profesional adalah membahayakan eksistensi universitas sebagai benteng terakhir nurani bangsa ini. Pergeseran PTN BLU menjadi PTN BH seharusnya menempatkan ITS menjadi kampus yang lebih bebas dan mandiri. Bukan sekedar mandiri secara keuangan tapi juga mandiri dan bebas meng-gagas ide-ide yang tidak sekedar inovatif tapi juga disruptif yang dituntut oleh Revolusi Industri 4.0. Tentu agak mengherankan jika pejabat-pejabat fasih bicara soal revolusi, tapi menumpas iklim kebebasan

sambil mengembangkan ketakutan di mana-mana, termasuk di kampus.

Dalam upaya membangun masyarakat yang bebas itu, sebagai dosen saya menolak kerangka pikir UU Ormas, juga UU anti-teror. Jika ini dinilai mendukung Ormas-ormas Islam tertentu, ya apa boleh buat.

Saya ingat pesan Ki Hadjar Dewantara. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka. Hanya di atas kemerdekaan jiwa itulah integritas menemukan lahan yang subur. Setelah Surabaya pada Minggu 13/5 pagi dikejutkan oleh ledakan bom dengan korban belasan warga Surabaya yang hendak beribadah di beberapa gereja, sebagai warga Surabaya Kota Pahlawan, dan dosen ITS sebagai Kampus Pahlawan, saya menolak rasa takut dan menyatakan menggugat proses-proses perampasan kebebasan berserikat, dan menyatakan pendapat yang telah dijamin konstitusi. Perlu segera disadari bahwa pahlawan-pahlawan itu gugur untuk merebut dan membela kebebasan -untuk mencari dan menemukan kebenaran-, bukan membela yang mbyar.



## ❖ Menuju Negara Gagal ?

Jika dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara mutakhir kita tempatkan dalam sorotan alinea pertama Pembukaan UUD45, sangat penting kita mencermati postulat Isaiiah Berlin bahwa "Berada di tengah itu adalah sebuah posisi yang sangat terbuka, berbahaya dan tak-tahu-berterimakasih". Alinea itu menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan sebagai hak atas semua bangsa. Penjajahan sebagai perampasan hak atas kemerdekaan itu harus dilawan karena tidak manusiawi dan dzalim. Soalnya adalah : siapa yang nekad mau mengambil posisi-tengah itu?

Berlin 60 tahun lalu -dalam *Two Concepts of Liberty*- ingin mengajukan tantangan bahwa siapapun yang beniat memperjuangkan kemerdekaan - sekaligus menegakkan keadilan - akan berada dalam posisi tengah yang sulit: sasaran kecaman, intimidasi, pemenjaraan, pembunuhan karakter -bahkan terbunuh-, sehingga berbahaya, sementara perjuangannya tidak dihargai. Dalam catatan saya, orang-orang ini telah memutuskan mengambil posisi tengah: Yesus, Muhammad Rasulullah, Martin Luther King, Bob Kennedy, Malcolm X, Bung Karno, dan Bung Hatta. Mereka ini memiliki nyali dan stamina untuk mengambil posisi-tengah dengan ketegangan yang tidak kunjung selesai itu dengan berani menolak untuk berhenti berpikir bebas.



Dalam situasi masyarakat yang sedang kacau terancam tergelincir menjadi negara-gagal, pejuang kebebasan itu akan disebut, pertama sebagai tukang kritik tidak-profesional yang "tidak kebagian kue". Itu belum selesai, kemudian dia disebut radikal, ekstremis, fundamentalis, bahkan pemecah belah. Untuk kasus Indonesia mutakhir, mereka akan disebut: anti-Pancasila dan NKRI. Padahal mereka itu cuma nekad memberanikan diri menjadi peniup peringatan dini sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi. Patut disesalkan, walupun bisa dipahami, bahwa media masa arus utama yang telah menjadi instrumen propaganda pemodal partisan ikut memperkuat stigma buruk pejuang kebebasan itu.

Perlu disadari bahwa reformasi semula dimaksudkan agar kekuatan Trias Politica tegak melakukan *checks-and-balances*. Media massa dan kaum intelektual diharapkan menguatkan investasi moral publik bagi negara demokratis. Namun angin reformasi selama Pemerintahan Jokowi-JK ini justru berbalik arah : melalui UU Ormas dan UU Anti-teror, Pemerintah cenderung makin otoriter persis seperti selama fase terakhir Orde Lama dan seluruh fase Orde Baru.

Ironi reformasi itu adalah bahwa tanda-tanda negara gagal itu makin tampak di depan mata kita : kekuasaan kehakiman masih defisit integritas, KPK kehilangan kredibilitas, POLRI diperalat menjadi mesin penyebar ketakutan masyarakat. Pada saat yang

sama DPR justru menjadi oligarch tanpa kekuatan oposisi yang efektif, media massa menjadi alat propaganda pemodal partisan. DPR justru merestui berbagai regulasi yang mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat demi stabilitas dan keamanan investasi.

Tinggal benteng kekuatan pro-demokrasi terakhir adalah universitas. Jika para civitas akademika di berbagai kampus keasyikan mengejar status dan proyek lalu takut mengambil sikap maka Indonesia Negara Gagal tinggal menunggu hari. Tentu sangat berbahaya bagi upaya penguatan masyarakat demokratis jika stigmatisasi kampus adalah sarang para radikal anti-Pancasila justru datang dari Menristekdikti.

Di tengah islamophobia yang marak menghingapi banyak elit negri yang saya cintai ini, hemat saya -sebagai muslim-, sangat instruktif untuk menyatakan bahwa Islam adalah platform-tengah dengan credo keadilan tanpa pandang bulu tiada tanding. Islam tegas menolak diskriminasi primordial dan peribadatan. Islam percaya bahwa kebebasan adalah prasyarat bagi pertanggungjawaban manusia di hadapanNya. Penjajahan, dan perampasan kebebasan oleh kekuatan-kekuatan Fir'aun adalah lingkungan yang buruk bagi Islam.

Islam, seperti Pancasila, adalah platform hidup bersama - kalimat in sawaa-in - dalam lingkungan global yang majemuk. Dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Pancasila adalah syarat perlu,

sementara Islam sebagai syarat cukupnya memberi ekosistem yang kondusif bagi perwujudan Pancasila. Seperti yang dikatakan Bung Karno, para elite yang gagal memahami internasionalisme akan terjerumus pada nasionalisme yang sempit dan oleh karenanya gagal memberi pengalaman hidup berPancasila di kepulauan bercirikan Nusantara ini.

Di atas KA Sancaka Solo-Surabaya, 25 Mei 2018.



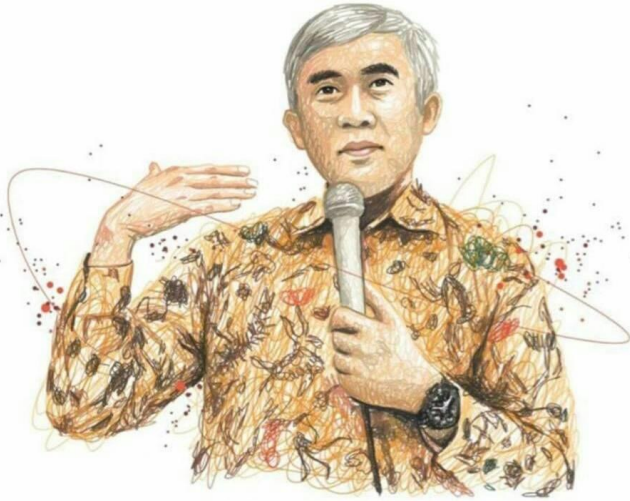
## Prasangka, Teror, dan Iman

Mengapa prasangka buruk itu dosa? Begitu prasangka buruk menguasai seseorang, maka dia menutup semua peluang untuk melihat kebaikan, bahkan niat berbuat baik sekalipun. Adagium pembuktian hipotesa yang diakrabi dunia ilmiah mengatakan: lebih baik melepas orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Jadi, berprasangka buruk itu dosa karena tidak ilmiah; sebuah sikap bodoh. Jika prasangka buruk itu tersebar secara sistematis, terstruktur dan masif, maka masyarakat itu sedang meluncur jatuh ke tingkat jahiliyyah.

Saat prasangka buruk ada di mana-mana, maka ketakutan pun merebak di mana-mana. Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa takut adalah dosa terbesar. Mengapa? Karena rasa takut adalah lahan subur bagi dusta. Padahal jujur adalah syarat bagi iman.

Dalam masyarakat yang hidup dalam teror, kita mesti waspada karena barangkali iman itu sudah merayap pergi.



## #FTKStandFor ProfDaniel

### Itqon Askary

It infuriates me knowing that one of the most bright minded people in ITS is forced to step down from his position because he was suspected endorsing radical ideologies and supporting HTI.

For the record, I can assure you that because of his intelligence and belief, he would be the last person to do that. He's a person who is very tolerant, who speaks for people who are underprivileged, and fights for what is right.



As an academician, what he stood for was not HTI, but free speech. He criticized the government as a form of check and balance because he felt that the decision from the government was authoritarian. Banning a certain group and preventing them from having a platform to voice out their opinions. It was a valid concern from him.

I've known him even before I entered and studied at ITS as he is close friends with my parents. And as an individual, he definitely deserves to be an example for his students. His dedication towards his field, passion to contribute to his country, and humility is amazing.

I hope that the truth will prevail and justice will be served. There are lots of people who support you Prof! Because you've influenced so many people for the better. Including me.



## Curriculum Vitae



**Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M.RINA**, dilahirkan di Klaten pada 2 Juli 1961. Menempuh jenjang pendidikan TK Aisyiyah Masjid At Taqwa Halmahera, Semarang; SD Institut Indonesia, Semarang; SMP Negeri 2 Semarang; SMA Negeri 1-2 Semarang; Sarjana Teknik, ITS Teknik Perkapalan tahun 1986; Doktor (Ph.D) University of Newcastle Upon Tyne, Upon Tyne tahun 1991; dan System Operational Science, Summer Course, MIRCE Academy, University of Exeter, UK tahun 2001.

**Pengalaman profesi**, antara lain: Inspektur Mutu Lambung Baja, Divisi Kapal Perang, PT.PAL Indonesia, 1986-1988; Dosen Jurusan Teknik Kelautan ITS, 1988-sekarang; Practicing Naval Architect, 1991-sekarang; perencanaan kapal Multi-purpose untuk Kepulauan Sumenep, Madura; Koordinator Program Pascasarjana Teknologi Kelautan ITS 1995-1999; Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama dan Komunikasi ITS 1999-2003; Tim Asistensi Menristek 2004-2006; Practicing Marketer, 2006-sekarang; dan Practicing Engineer, 2013 Perencanaan Pelabuhan Manyar Gresik.

**Aktivitas sosial**, antara lain: Ketua Dewan Pakar Jatim (2005-2006); Ketua Dewan Pendidikan Jatim (2002-2005); Presiden Gerakan Anak Indonesia Membaca (2010-2012); Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Surabaya (2004-2016); Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur (2009-2016); Ketua Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur (2009-sekarang); Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi, Jurusan Teknik Kelautan ITS (2010-sekarang); Dewan Kelautan Indonesia Jawa Timur (2015-2017); Kurator Kuliah Bung Karno untuk Kebangsaan dan Teknologi (2013-2014); Kurator Kuliah Djoeanda untuk Kebangsaan dan Kemaritiman (2017); Kurator Kuliah Ki Hadjar Dewantaran untuk Kebangsaan dan Pendidikan (2015); dan sejak tahun 2006 memperoleh Certified Professional Marketer (World Marketing Federeation).

Prof Daniel, begitu panggilan akrabnya, telah dikaruniai Sembilan anak dan sebelas cucu. Tinggal di Jalan Teknik Industri D-27, Perum ITS, Sukolilo, Surabaya. Untuk korespondensi dapat melalui [dmrosyid@gmail.com](mailto:dmrosyid@gmail.com) atau telp. 031-5931217/081-335-272-761 atau *website* [www.danielrosyid.com](http://www.danielrosyid.com).





**ROSYID  
COLLEGE  
OF ARTS &  
MARITIME  
STUDIES.**